

# PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA MELALUI UMKM GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN MERAUKE

Nadia Rizki Amalia Mustafa

NPP. 30.1440

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: [mustafanadia20@gmail.com](mailto:mustafanadia20@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Idris Patarai, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Many MSME actors still rely on word of mouth strategies that are no longer effective, especially now that the market continues to develop and competition is getting tougher. Overall, the performance of SMEs in the formal small industry sector has increased but is still relatively low. Therefore, increasing the income of the MSME community in Merauke is the main focus of the local government because income is still small with spending on staples increasing.. **Purpose:** This study aims to find out in detail how to empower native Papuans through the MSME industry in Merauke Regency, analyze the supporting and inhibiting factors that accompany it, and steps in addressing this. **Method:** The research method used in this research uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. This study uses Oos M. Anwas's theory of empowerment, especially community empowerment. This theory has several dimensions, namely: 1) society, 2) cultural values and local wisdom, 3) community participation, 4) facilitators, and 5) social and economic aspects. Determination of informants was done by purposive sampling method with a total of 10 informants. **Result:** The community of MSME actors in Merauke Regency gets a considerable economic impact due to the empowerment programs carried out by the local government. With the empowerment carried out by the local government, the community, especially MSME actors in Merauke Regency, have experienced increased income and increased welfare. **Conclusion:** Empowerment of indigenous Papuans through MSMEs in Merauke Regency has not run optimally. Empowerment has been formulated and even implemented as expected. However, in practice the empowerment carried out is still faced with various problems that hinder the implementation of business development. Especially the paradigm that is still spreading in society is that the government still pays little attention to MSME actors. **Keywords:** Empowerment, Indigenous Papuans, MSMEs.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** UMKM masih banyak yang bergantung pada strategi mulut ke mulut yang sudah tidak efektif lagi, terlebih saat ini pasar terus mengalami perkembangan dan persaingan semakin ketat. Secara keseluruhan kinerja UMKM sektor industri kecil formal mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM di Merauke menjadi fokus utama pemerintah daerah karena pendapatan yang masih kecil dengan pengeluaran untuk bahan pokok yang semakin meningkat. **Tujuan:** Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui detail bagaimana pemberdayaan orang asli papua melalui industri UMKM di Kabupaten Merauke, menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya, serta langkah dalam menyikapi hal tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori Oos M. Anwas tentang pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat. Teori ini memiliki beberapa dimensi yaitu: 1) masyarakat, 2) nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, 3) partisipasi masyarakat, 4) fasilitator, dan 5) aspek sosial dan ekonomi. Penetapan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan total 10 informan. **Hasil/Temuan:** Masyarakat para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mendapatkan dampak perekonomian yang cukup besar dikarenakan adanya program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan. **Kesimpulan:** Pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke belum berjalan maksimal. Pemberdayaan telah dirumuskan bahkan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengembangan usaha. Terutama paradigma yang masih tersebar di masyarakat bahwa pemerintah masih kurang memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM..

**Kata kunci:** Orang Asli Papua, Pemberdayaan, UMKM.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan di masa lampau. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidamampuannya baik karena factor internal maupaun eksternal. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan dilaksanakan oleh setiap daerah agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk bertahan di era globalisasi yang tiap tahunnya menghasilkan inovasi yang terbaru. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kreativitas masyarakat kecil yang dapat menopang kegiatan ekonomi. Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah serius ingin meningkatkan mutu sumber daya manusia yang lebih baik. Sehingga dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pemberdayaan yang diperlukan..

Permasalahan yang terjadi pada perkembangan UMKM di Indonesia mempunyai permasalahan terhadap kurangnya fasilitas, pembinaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), modal usaha, kurangnya jaringan kerja sama usaha, juga market place dalam pengembangan usaha tersebut. Pembangunan dan pengembangan industry kecil seperti UMKM merupakan salah satu bagian dari program pembangunan ekonomi nasional.

Saat ini pelaku UMKM masih banyak yang bergantung pada strategi pemasaran dengan informasi dari mulut ke mulut. Ini merupakan strategi yang yang tidak efektif, terlebih lagi saat ini pasar terus mengalami perkembangan dan persaingan yang semakin ketat. Di era reformasi ini



pemerintah melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) telah telah berbenah dalam menangani masalah perekonomian desa. Salah satu program pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan juga angka kemiskinan adalah dengan cara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2017), Kabupaten Merauke menjadi salah satu bagian dari 29 wilayah di Provinsi Papua yang terletak disebelah selatan dan terluas apabila dibandingkan dengan daerah atau kota lain di Provinsi Papua. Kabupaten Merauke tahun 2017 mempunyai luas wilayah 46.791,63 km<sup>2</sup>, yang menaungi 22 distrik, 11 kelurahan dan 179 kampung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke mencatat jumlah penduduk di Kabupaten Merauke pada tahun 2021 mencapai 231.699 ribu jiwa. Pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan penjualan UMKM sektor industri kecil formal di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan dari 3,5% menjadi 4,2%. Secara keseluruhan kinerja UMKM sektor industri kecil formal mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM di Merauke menjadi fokus utama pemerintah daerah karena pendapatan yang masih kecil dengan pengeluaran untuk bahan pokok yang semakin meningkat.

Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM guna meningkatkan perekonomian di Kabupaten Merauke. Sehingga, melalui penelitian ini diharapkan dapat gambaran detail bagaimana pemberdayaan orang asli papua melalui industri UMKM di Kabupaten Merauke, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Saat ini pelaku UMKM masih banyak yang bergantung pada strategi mulut ke mulut yang sudah tidak efektif lagi, terlebih saat ini pasar terus mengalami perkembangan dan persaingan semakin ketat. Secara keseluruhan kinerja UMKM sektor industri kecil formal mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM di Merauke menjadi fokus utama pemerintah daerah karena pendapatan yang masih kecil dengan pengeluaran untuk bahan pokok yang semakin meningkat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan Sahrul Amar (2021) berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima” yang meneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di Kabupaten Bima. Fokus penelitian yaitu pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di Kabupaten Bima, dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada lokus penelitian. Pada penelitian lain, Adiba Jeyhan (2018) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Mikro” yang meneliti terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk mengembangkannya usaha mikro melalui pemberdayaan masyarakat meliputi aspek penyelenggaraan

pembinaan, penyaluran bantuan sosial dan fasilitator pengembangan usaha mikro. Sedangkan faktor penghambat berupa permasalahan pemasaran produk, manajemen usaha, serta permasalahan Permodalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk mengembangkan usaha mikro melalui pemberdayaan masyarakat meliputi aspek 1) penyelenggaraan pembinaan; 2) penyaluran bantuan social ; 3) fasilitator pengembangan usaha mikro. Factor pendukungnya adalah adanya paguyuban UKM, dukungan dari instansi-instansi lainnya, dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan. Sedangkan factor penghambat adalah adanya permasalahan teknis usaha mikro yang meliputi permasalahan pemasaran produk dan manajemen usaha, serta permasalahan permodalan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ayuni Lathifah (2019) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Masyarakat melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” dimana fokus penelitian ini adalah pada deskripsi proses pemberdayaan melalui UMKM dan faktor yang mendorong dan menghambat proses pemberdayaan ini. Selain itu, Rani Yanti (2020) dalam penelitiannya berjudul “Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi” menunjukkan peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi yaitu melakukan kegiatan pelatihan usaha, pameran UMKM, hingga pendampingan usaha. Kendalanya adalah minim pemahaman dari masyarakat juga terbatasnya jumlah pegawai penyuluh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Factor pendukung pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya dukungan pemerintah berupa program-program pelatihan beserta narasumber, dan tingginya motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi local dengan baik. Sedangkan factor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Teknik pemasaran online serta pemasarannya yang belum berkembang secara meluas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan serta kegiatan ini dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam pemasaran secara online bagi para pelaku UMKM.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni guna mengetahui apakah pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM telah berjalan dengan semestinya dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan kendala yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM guna meningkatkan perekonomian daerah. Lokasi penelitian juga berbeda, peneliti menetapkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui gambaran detail bagaimana pemberdayaan orang asli papua melalui industri UMKM di Kabupaten Merauke, menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya, serta langkah dalam menyikapi faktor pendukung dan penghambat tersebut.



## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori Oos M. Anwas tentang pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat. Teori ini memiliki beberapa dimensi yaitu: 1) masyarakat, 2) nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, 3) partisipasi masyarakat, 4) fasilitator, dan 5) aspek sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Studi pustaka. Penulis menetapkan informan dengan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan penulis untuk mendapatkan bahan dalam melakukan penelitian. Total Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan triangulasi data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

**Tabel 1.**  
Informan penelitian

No	Informan	Jumlah(orang)
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi	1
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1
3.	Kepala bidang perdagangan	1
4.	Kepala distrik Merauke	1
5.	Ketua Kelompok UMKM	3
6.	Masyarakat (orang asli papua)pelaku umkm	3
Jumlah		<b>10</b>

Sumber: Diolah Penulis, 2022

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pemberdayaan orang asli papua melalui Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Merauke

Menurut Anwas (2014) masyarakat merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengingat bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya. Proses pemberdayaan hanya akan berjalan dengan baik jika adanya kerjasama antar pihak pemberayaan (pemerintah) dan pihak yang diberdayakan (masyarakat)

#### 1. Pemberdayaan yang fokus kepada Masyarakat

Pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat khususnya masyarakat (orang asli papua) para pelaku UMKM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka meningkatkan produktivitas agar tetap terjaga eksistensinya. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke, Eric Y. B. Rumlus, Upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Merauke dalam melakukan pemberdayaan para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, dan membantu meningkatkan sarana dan prasarana.

#### 2. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Dalam dimensi pemberdayaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal memiliki indikator yaitu penumbuhan nilai-nilai budaya dan menjaga kearifan lokal. Penumbuhan nilai-nilai budaya telah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Merauke secara turun-temurun dari nenek moyang yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Termasuk juga para pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara turun-temurun, tetapi usaha yang dijalankan sulit berkembang dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku umkm itu sendiri. Sedangkan Untuk menjaga kearifan lokal tersebut dibutuhkannya partisipasi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk menunjukkan keberadaan dari para pelaku usaha sehingga dapat dikenal dan dapat menjadi ciri khas daerah tersebut.

### **3. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil. Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pemberdayaan yang dilakukan. Jika tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan semestinya. Pemerintah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam tiap program yang akan dijalankan. Dalam dimensi pemberdayaan partisipasi masyarakat memiliki indikator yaitu: 1) Wujud Partisipasi Masyarakat Bersifat Fisik (Materi, Tenaga, Bahan) dan 2) Wujud Partisipasi Masyarakat Bersifat Nonfisik (Saran, Waktu, Dukungan).

Dalam indikator ini yang menjadi bagian dari partisipasi masyarakat bersifat fisik (materi, tenaga, dan bahan) yaitu untuk saat ini masyarakat kabupaten Merauke sudah ikut membantu pemerintah dalam memberdayakan setiap pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan perekonomian yang ada. Bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara membantu memberikan tenaga mereka untuk membangun sarana dan prasarana penunjang bagi para pelaku umkm, partisipasi lainnya yaitu dengan ikut membantu mengikuti pelatihan dan mengajari hasil dari pelatihan tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan tentang wujud dan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara membantu memberikan tenaganya untuk meningkatkan produktivitas dan juga sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang akan berimbang kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Merauke.

Partisipasi masyarakat berupa saran, waktu, dan dukungan sangatlah dibutuhkan untuk membantu berjalannya suatu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat Kabupaten Merauke juga ikut berpartisipasi membantu pemerintah daerah dengan melakukan beberapa kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa masyarakat Kabupaten Merauke membantu pemerintah juga para pelaku umkm dengan dukungan juga mmbantu dengan cara memasarkan hasil-hasil usaha dari para pelaku umkm melalui akun-akun sosial media pribadi ataupun menjual kembali produk-produk dari para pelaku usaha tersebut. Selain itu, masyarakat juga memberikan waktunya untuk peningkatan kesejahteraan (dalam rangka pelatihan) dan dukungan terkait pembangunan infrastruktur pendukung UMKM.

### **4. Fasilitator**

Menurut teori Anwas (2014) lembaga pemberdayaan menjadi fasilitator yang memiliki kemampuan atau kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh



masyarakat. Fasilitator dapat diartikan sebagai penyalur atau yang membantu berjalannya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

### **5. Aspek sosiologi dan ekonomi**

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengubah keadaan baik itu keadaan sosial dan ekonomi masyarakat untuk menjadi lebih baik dari sebelum diadakannya pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah yang melakukan pemberdayaan harus melihat aspek sosial dan ekonomi untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam dimensi aspek sosial dan ekonomi menurut Anwas (2014) memiliki indikator yaitu peningkatan kesejahteraan dan kenaikan pendapatan. Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Merauke menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Masyarakat para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mendapatkan dampak perekonomian yang cukup besar dikarenakan adanya program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan.

### **3.2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke**

Faktor pendukung dalam proses pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke yaitu : 1) Pembinaan Dasar, 2) Pembentukan Kelompok Usaha, dan 3) Ranah Penjualan Digital. Pembinaan yang dilakukan adalah menumbuhkan tekad dan kepercayaan diri yang kuat terhadap pelaku usaha agar memiliki mental yang kuat dalam membuka usaha, karena tidak sedikit pelaku usaha yang gulung tikar tidak mau berusaha lagi membangun kembali usahanya sehingga melalui berbagai program yang telah ada diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa usaha yang harus dimiliki para pelaku UMKM. Kelompok usaha merupakan salah satu upaya dari pemerintah agar lebih mudah memberikan bantuan terhadap pelaku usaha mikro seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama yang beranggotakan beberapa pelaku usaha untuk bersama-sama meningkatkan hasil produksinya agar lebih unggul dan maksimal. Selain upaya yang dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Disperindagkop senantiasa mengikutsertakan para pelaku usaha pada setiap event yang ada seperti halnya festival di tingkat Kabupaten dan Provinsi yang secara rutin diadakan di Kabupaten Merauke. Disperindagkop telah berupaya membangun mitra kerja sama dengan beberapa pihak dalam rangka mempromosikan produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Disperindagkop telah membangun kerja sama dengan berbagai dinas di Kabupaten Merauke untuk membuat forum jual beli *online* yang bertujuan untuk membantu memasarkan produk dari para pelaku UMKM.

Hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM Di Kabupaten Merauke yaitu : UMKM yang ada di Kabupaten Merauke masih bersifat tradisional, banyak program dari pemerintah yang tidak berjalan dengan semestinya, dan kurangnya kesadaran dari para pelaku umkm untuk mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah. Masalah

utama yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha pada umumnya adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Mayoritas pelaku usaha mikro masih menggunakan modal sendiri dalam mengembangkan usahanya. Kebanyakan dari mereka memang lebih nyaman menggunakan modal sendiri karena tidak perlu membayar angsuran perbulan jika harus meminjam modal. Jika dilihat dari segi modal usaha yang digunakan oleh para pelaku UMKM ini untuk melakukan kegiatannya dapat dikatakan masih sangat minim, karena modal yang didapat hanya dari hasil penjualan produksi sebelumnya yang kemudian digunakan untuk produksi selanjutnya.

Ketersediaan SDM yang terbatas dalam pembedayaan masyarakat di bidang UMKM masih banyak ditemukannya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal mengenai cara berbisnis yang baik dan benar. SDM yang tersedia kurang mengembangkan diri untuk bergerak lebih maju, kebanyakan dari mereka lebih suka melanjutkan kegiatan yang sudah ada atau mewarisi usaha keluarga tanpa ada pikiran untuk berinovasi dan mengembangkan usaha tersebut. Kesadaran para pelaku UMKM untuk membuat izin produksi juga masih kurang, padahal dengan adanya izin usaha membuat para pelaku usaha lebih mudah mendapatkan bantuan dan memudahkan dalam urusan pendataan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dapat diketahui juga bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin produksi. Banyak dari mereka yang membuka usaha berjalan seadanya tanpa berpikir untuk memajukan serta mengembangkan usahanya. Para pelaku usaha juga hanya memproduksi barang seadanya dan semampunya sesuai pesanan sehingga target yang ingin dicapai tidak jelas dan tidak ada perubahan untuk lebih baik kedepan.

Keterbatasan SDM terutama dari aspek kualitas berpengaruh terhadap tingkat manajemen UMKM yang rata-rata perlu perhatian lebih intensif. Para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mempunyai system manajemen yang belum baik. Pengelolaan usaha masih tradisional kurang memperhitungkan rencana produksi, keuangan, dan juga keuntungan. Kemampuan pelaku usaha dalam persaingan pasar masih tergolong rendah dan adanya harga pasar mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Pemasaran yang biasa dilakukan hanyalah berlangsung dari mulut ke mulut atau dari satu tempat ke tempat lainnya.

### **3.3. Upaya dinas dalam mengatasi faktor penghambat dalam pemberdayaan orang asli papua melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan tentu memiliki berbagai hambatan serta kendala yang harus dihadapi dengan berbagai solusi yang telah dirumuskan. Begitu juga dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM yang ada. Meskipun memiliki beberapa faktor penghambat dalam proses pemberdayaan terdapat pula faktor pendukung yang bisa dijadikan peluang dalam upaya mengatasi hambatan yang sedang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui Disperindagkop ialah : 1) Mengubah pemikiran para pelaku UMKM dengan meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi; 2) Memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku UMKM; dan 3) Membantu mengarahkan para pelaku UMKM untuk fokus pada kinerja produktivitas usahanya.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**



Berbagai upaya pemberdayaan orang asli papua melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum berjalan maksimal, belum ada agenda evaluasi untuk mengukur capaian secara konkrit. Pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan proses pemberdayaan yang dilakukan dapat mengetahui apakah program pemberdayaan tersebut telah berjalan secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pemberdayaan para pelaku UMKM juga perlu ditingkatkan lagi.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat lainnya berkaitan dengan UMKM di Kabupaten Merauke ialah pola pikir. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan tentang manfaat wirausaha dan bagaimana merintis bisnis secara efektif. Tetapi saat ini pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya dalam membangun beberapa usaha yang prospektif bagi UMKM Papua. Pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Papua membuka kesempatan bagi pelaku UMKM dan siswa asal papua untuk mendapatkan beasiswa dan pelatihan kewirausahaan. Dengan adanya beasiswa ini pemerintah berharap pola pikir masyarakat papua menjadi lebih terbuka dan bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kewirausahaan untuk membangun daerahnya sendiri.

## **IV. KESIMPULAN**

Pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke belum berjalan maksimal. Pemberdayaan telah dirumuskan bahkan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengembangan usaha. Terutama paradigma yang masih tersebar di masyarakat bahwa pemerintah masih kurang memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM.

Faktor penghambat pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke, antara lain: UMKM yang ada di Kabupaten Merauke masih bersifat tradisional, banyak program dari pemerintah yang tidak berjalan dengan semestinya, dan kurangnya kesadaran dari para pelaku umkm untuk mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, upaya yang dilakukan adalah : 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi; 2) Memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku UMKM; dan 3) Membantu mengarahkan para pelaku UMKM untuk fokus pada kinerja produktivitas usahanya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki keterbatasan berupa waktu penelitian yang tergolong singkat. Singkatnya waktu penelitian menyebabkan peneliti kurang maksimal dalam melakukan observasi sehingga berdampak ke hasil kajian peneliti.

**Arah Masa Depan Penulisan.** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih awam dilakukan di lokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke sehingga memperoleh jawaban yang lebih maksimal dalam menjawab setiap rumusan masalah yang ada.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih sebesar besarnya kami tujukan pada seluruh informan penelitian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala bidang perdagangan, Kepala distrik Merauke, Ketua Kelompok UMKM, pelaku UMKM, dan Tokoh Masyarakat atas segala bantuan dan keramahannya sehingga penelitian sederhana ini dapat terselesaikan dengan tanpa suatu halangan apapun.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. Pemberdayaan masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Amar, Sahrul. “Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di KabupatenBima.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Lathifah, Ayuni. “Pemberdayaan masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.” Universitas Negeri Semarang (2019).
- Shafira, Adiba Jeyhan. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro.” Universitas Brawijaya, 2018.
- Yanti, Rani. “Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

